

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Pelaksanaan Perhutanan Sosial di HKm Solok Radjo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari kondisi kelembagaan, kondisi pengelolaan hutan serta kondisi usaha HKm KPSU Solok Radjo saat ini, ternyata HKm KPSU Solok Radjo belum mampu menyelesaikan permasalahan tenurial dan mencegah deforestasi hutan yang terlihat dari:
 - Maraknya penebangan liar dan perambahan kawasan hutan lindung bahkan pembangunan jalan beton, pembangunan mushala serta pesantren di dalam kawasan hutan lindung yang menjadi wilayah pengelolaan HKm KPSU Solok Radjo.
 - Berkurangnya luas tutupan hutan yang dikelola HKm Solok Radjo pada rentang tahun 2017-2022 seluas 145,05 ha atau rata-rata 0,90% /tahun.
 - Dominasi perladangan hortikultura di kawasan hutan lindung yang mengakibatkan hilangnya fungsi lindung pada kawasan tersebut.
2. Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial oleh HKm KPSU Solok Radjo juga belum maksimal yang terlihat dari:
 - Belum dilakukannya penataan areal untuk kawasan pemanfaatan dan kawasan lindung.
 - Realisasi pelaksanaan RKU HKm Solok Radjo sampai 5 tahun ini baru mencapai 35%. RKT yang seharusnya disusun setiap tahun hanya disusun pada tahun 2021 dan capaiannya hanya 44.
 - Dari aspek pengembangan usaha HKm KPSU Solok Radjo berhasil mendapatkan Sertifikat Platinum dari Dirjen PSKL. Indikator penilaiannya adalah kelola usaha, kelola kawasan dan kelola kelembagaan, berdasarkan analisis HKm KPSU Solok Radjo belum pantas mendapatkan sertifikat platinum.
 - Belum ada upaya penanganan konflik tenurial yang dilakukan oleh HKm KPSU Solok Radjo.

B. Saran

Beberapa saran dari penelitian ini adalah:

- a. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial dimana tidak hanya masyarakat sebagai pemegang hak yang menjadi objek evaluasi tetapi juga harus dilakukan evaluasi terhadap pendamping, KPHL serta Dinas Kehutanan sebagai instansi pelaksana program sehingga tujuan utama program Perhutanan Sosial dapat tercapai.
- b. Perlu dukungan dan kebijakan aktif Pemerintah pada tahapan pelaksanaan program Perhutanan Sosial oleh Masyarakat Pemegang Izin terutama pada tahapan kegiatan yang membutuhkan penguasaan teknologi dan anggaran yang cukup besar seperti penyusunan RKU/RKT dan penandaan batas zonasi areal kerja IUPHKm.

